



LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Sasaran Kerja Pegawai

SKP



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. JemurAndayani No. 1 Surabaya (60236)
Telp. (031) 8477551, Faks (031) 8477404

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategik yang telah ditetapkan.

Surabaya, Maret 2016

**KEPALA BIDANG
PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN**

SUMARTINI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610326 198203 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B. Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A. Perjanjian Kinerja.....	7
B. Capaian Kinerja	7
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	11
D. Rencana Tindak Lanjut	14
E. Tanggapan Atasan Langsung	14
BAB III PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1.	Rentang Pengukuran Capaian Kinerja	7
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.....	8
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	8
Tabel 2.4.	Pagu anggaran dan Relalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk mengemban sebagian tugas dari Bapak Gubernur Jawa Timur dibidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan akan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan pendistribusian dan penataan pegawai. Tugas tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berkualitas, kompeten, dan profesional sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu untuk pemenuhan akan pegawai yang berkualitas tersebut, BKD Provinsi Jawa Timur diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian melalui penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang berkualitas, profesional, dan akuntebel. Pelaksanaan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang diwujudkan didalam Pelaporan Kinerja. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran, serta didalam penyusunan laporan kinerja harus didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kerjanya, dan mewujudkan akuntabilitas seorang pimpinan serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik.

Dengan semakin besarnya tuntutan dari masyarakat (*stakeholders*) kepada terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya didalam pengelolaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, harus berbasis pada tiga pilar yakni adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dari semua pihak (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) harus diartikan sebagai suatu perwujudan dari bentuk kewajiban para pengelola organisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan atau kegagalan dari pada pelaksanaan visi dan misi organisasi pemerintahan tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ini disusun dengan maksud memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015. Laporan kinerja ini juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015, termasuk

menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilannya dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan membantu Gubernur Jawa Timur dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang kepegawaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian serta mengevaluasi SDM Aparatur di Jawa Timur.

Pengelolaan manajemen SDM Aparatur tersebut mulai dari perencanaan, penataan, rekrutmen, formasi dan pengembangan, mutasi, pensiun, pembinaan, pengembangan SIMPEG berbasis **Informacy and Technology (IT)** dan pendistribusian PNS sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta peningkatan kesejahteraan berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, sedangkan mengevaluasi SDM Aparatur yaitu melaksanakan penilaian uji kompetensi di Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan kebutuhan pegawai, Pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier dan jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Pelaksanaan kebijakan pengangkatan, pengembangan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma/peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

4. Perumusan kebijakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian yang berlaku;
5. Penyusunan kajian peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian;
6. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi terkait dengan permasalahan di bidang kepegawaian;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan, jabatan, dan formasi pegawai;
8. Pelaksanaan pembinaan administrasi PNSD;
9. Pengolahan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian serta dokumentasi Kepegawaian berbasis elektronik;
10. Dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Provinsi Jawa Timur

Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2008 uraian tugas sebagai berikut:

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Dengan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai program yang ditetapkan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan bahan, penyusunan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai dan pengelolaan pemberian penghargaan tanda jasa;

- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi permohonan perkawinan dan atau perceraian pegawai;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Pergub Jawa Timur No. 110 tahun 2008

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pembinaan ;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan ;

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.

1. Sub Bidang Pembinaan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan penyusunan telaahan dan pertimbangan produk peraturan perundangan di bidang kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan sumpah / janji PNSD;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan nilai, etika dan norma PNSD;
 - e. menyiapkan bahan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan ijazah palsu serta penindakannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan pengusulan ijin bepergian ke luar negeri dan cuti Pegawai;
 - g. menyiapkan bahan penyelesaian permohonan perkawinankedua dan seterusnya dan atau perceraian pegawai serta permohonan Kartu Isteri dan Kartu Suami;
 - h. menyiapkan bahan penyelesaian administrasi laporan pajak pribadi pegawai (LP2P);
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Kesejahteraan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - b. menyiapkan bahan pemberian pembekalan bagi PNSD yang memasuki purna tugas;
 - c. menyiapkan bahan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya;
 - d. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pemberian Kartu Askes, Taspen dan bantuan kesejahteraan lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pemrosesan penyelenggaraan fasilitasi pemeriksaan kesehatan pegawai;
 - f. menyiapkan bahan persiapan pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan;
 - g. menyiapkan bahan pengadministrasian fasilitasi kebutuhan perumahan dan meneliti permohonan BAPERTARUM;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

i. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2015 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan manajemen aparatur;
2. Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Pelayanan Manajemen dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran : Meningkatnya pelayanan manajemen aparatur serta terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan manajemen aparatur serta terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur	1. Persentase Capaian Rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja dari pegawai ASN	75%	85,74%	114,32%
	2. Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN	80%	91%	113,75%
<p>Capaian indikator sasaran meningkatnya pelayanan manajemen aparatur serta program pembinaan dan pengembangan aparatur adalah = $(114,32\% + 113,75\%) : 2 = 114,04\%$ atau katagori "Sangat Baik"</p>				

Sumber Data : Bidang Binkes, 31 Desember 2015

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
(cost per outcome)

Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran Meningkatnya pelayanan manajemen aparatur	Prosentase Capaian Rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja dari pegawai ASN	75%	85,74%	114,32%	1.617.012.500,00	1.476.343.988,00	91,30%

Program 1.1 Peningkatan sistem reward and punishment							
Program 1.2 Pelayanan administrasi BPJS dan TASPEN							
Program 1.3 Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya							
Sasaran Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN	80%	91%	113,75%	1.030.464.500,00	901.421.545,00	87,48%
Program 1.4 Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin & ijazah palsu serta penindakan sesuai ketentuan yang berlaku							
Program 1.5 Peningkatan pelayanan administrasi ijin LN dan cuti pegawai							
Program 1.6 Peningkatan Pelayanan administrasi pelaporan LP2P							
Program 1.7 Peningkatan Pelayanan administrasi permohonan perkawinan/perceraian pegawai dan Kris karsu							

Dari tabel tersebut dapat diuraikan persentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sebagai berikut :

- $$\frac{\text{Jumlah persentase capaian indikator kinerja}}{2} = \frac{114,32\% + 113,75\%}{2}$$
$$= 114,04\%$$
- $$\frac{\text{Jumlah persentase pencapaian anggaran}}{2} = \frac{91,30\% + 87,48\%}{2}$$
$$= 89,39\%$$

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sebesar 114,04% dan capaian serapan anggaran sebesar 89,39%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah tersebut artinya kinerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sudah baik atau sesuai.

Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepegawaian dengan sasaran meningkatnya pelayanan manajemen aparatur dan terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur, pengukuran ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan hak-hak kepegawaiannya dan sekaligus untuk menilai tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan larangan.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

BKD Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanannya, dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan, dalam hal ini PNS di Provinsi Jawa Timur maupun PNS dari Provinsi lainnya sehingga tercapai suatu kepuasan. Dalam rangka pemenuhan kepuasan masyarakat dimaksud, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai peran dalam upaya pembinaan kedisiplinan pegawai ASN yang dapat diukur dengan menggunakan absensi elektronik di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan sistem database kepegawaian. Selain itu juga membentuk sistem reward and punishment terkait dengan hasil penilaian kinerja dan perilaku kerja pegawai (termasuk penerapan tunjangan kinerja, penghargaan hingga sanksi administratif) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja (SKP) pegawai.

Pada tahun 2015 Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapat target untuk nilai capaian tingkat kedisiplinan PNS yang diukur dari prosentase tingkat kehadirannya selama 1 (satu) tahun sebesar 80% karena sebagai langkah awal dalam upaya penertiban penggunaan absensi elektronik di masing-masing SKPD. Pada pelaksanaannya tingkat kehadiran pegawai di 49 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 91%, kemudian dari tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun itu sehingga yang tidak hadir sejumlah 9% artinya dari jumlah ketidakhadiran tersebut diperoleh keterangan antara lain 1,1% sakit, 1% ijin, 0,77% cuti, 6,55% dinas luar, 0,17% pendidikan/tugas belajar, 0,01% diperbantukan, 0,001% tanpa keterangan.

Disamping itu dalam rangka pembentukan sistem reward and punishment, target yang ditetapkan diukur dari jumlah PNS yang nilai capaian SKPnya dalam kategori cukup

yaitu sejumlah 75%, jumlah ini ditentukan karena dianggap sebagai awal peralihan dari sistem lama yaitu DP-3 ke SKP namun dalam pelaksanaannya tidak ada pegawai yang nilainya cukup tetapi hampir semua mencapai nilai rata-rata baik yaitu sejumlah 85,74% dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian maka diketahui bahwa target capaian rata-rata kumulatif SKP sebesar 85,74% sehingga target yang telah ditetapkan sebesar 75% dalam rencana kerja tahunan tercapai atau terealisasi 114,32% atau kategori "Sangat Baik".

- Dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut :
Nilai rata-rata kumulatif SKP tahun berjalan (85,74%) x 100 %
Target rata-rata kumulatif SKP tahun berjalan (75%)
= 114,32%
- Untuk persentase tingkat kehadiran pegawai dapat diformulasikan sebagai berikut:
Tingkat kehadiran PNS x 100 %
Target tingkat kehadiran PNS
91% x 100 %
80%
= 113,75%

Jadi kesimpulan untuk dua indikator kinerja dengan sasaran meningkatnya pelayanan manajemen aparatur serta terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan persentase **114,04%** dengan katagori "**sangat baik**" sehingga dapat digambarkan bahwa upaya pelayanan dimaksud dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA

kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2015 maka dapat dilihat persentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2015.

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	2.647.477.000,00	2.377.765.533,00	89,81
1.	Program peningkatan pelayanan manajemen aparatur dengan kegiatan:	1.617.012.500,00	1.476.343.988,00	91,30
	Peningkatan kedisiplinan pegawai ASN			
2.	Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan:	1.030.464.500,00	901.421.545,00	87,48
	Terbentuknya sistem reward and punishment			

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran dalam kategori “**Sangat Baik**” namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan, antara lain yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi di masing-masing sub bidang belum terlaksana secara optimal;
2. Pelaksanaan tugas/kegiatan di masing-masing jabatan pegawai masih belum terlaksana dengan optimal. Masih terdapat pegawai yang mendapat tanggungjawab/tugas berlebih.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan kedisiplinan terutama dalam hal pelaporan secara rutin rekap daftar hadir PNS setiap bulan dan juga rekap penilaian prestasi kerja (SKP) setiap tahun.
2. Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyelarasan.
3. Peningkatan peran Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab bidang.
4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam LKj Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan metode penilaian checklist, dan pada metode ini menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan standart, sasaran dan prestasi kinerja pegawai ASN, sehingga penilai tinggal memilihnya. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, tetapi didalam penggunaan kalimat-kalimat yang umum, sehingga hal ini dapat

menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	
	
	
	
	

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Eselon III Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dan memenuhi verifikasi hasil capaian IKU Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai salah satu bagian penting dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah, maka Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan pada lingkungan manajemen kepegawaian daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terpenuhinya prosentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN (SKP) sebesar 114,32% dari target awal 75% dengan penyerapan anggaran 91,30%.
2. Terpenuhinya persentase tingkat kehadiran pegawai ASN sebesar 113,75% dari target awal sebesar 80% dengan penyerapan anggaran sebesar 87,48%.

Walaupun capaian kinerja dalam kategori “Sangat Baik” namun pencapaian penyerapan anggaran masih perlu dilakukan evaluasi agar ada penyesuaian.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Surabaya, 2016

Mengetahui
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007

SUMARTINI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610326 198203 2 005